

PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PRAKTIK *RISK DISCLOSURE* PADA PERBANKAN INDONESIA

Djoko Suhardjanto
Aryane Dewi
Erna Rahmawati
Firazonia M
Universitas Negeri Sebelas Maret

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance to risk disclosure of Indonesian banks. Corporate governance are identified as the board size, the proportion of independent director, the proportion of woman director, the educational background of president director, the culture background of president director, the number of board meetings, the number of audit committee meetings and the proportion of independent audit committee members. This study also uses leverage and profitability as control variable. The level of risk disclosure is measured based on identified items of Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003. Under purposive sampling, secondary data of 60 annual reports year 2007-2009 of banks in Indonesian Stock Exchange are selected. The average level of risk disclosure is 51.42%. The result indicates that the level of risk disclosure of banking is at low since risk disclosure is mandatory disclosure according PSAK No. 31 (revised 2000), PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (2006) and P3LKEPPBANK (2008). The result of multiple regression shows that corporate governance affects the level of risk disclosure through the variable board size and the number of board meetings. Other variable, the proportion of independent director, proportion of woman director, educational background of president director, culture background of president director, the number of audit committee meeting, and proportion of independent audit committee members are not good predictors for level of risk disclosure.

Keywords: risk disclosure, corporate governance, Indonesian banks

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran *corporate governance* dalam praktik *risk disclosure* pada perbankan Indonesia. Peran *corporate governance* direpresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komite audit independen. Perdebatan mengenai pentingnya pengungkapan risiko dimulai sejak tahun 1998 ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* menerbitkan *Financial Reporting of Risk-*

Proposals for A Statement of Business Risk yang menyarankan perusahaan untuk menyajikan pengungkapan mengenai risiko bisnisnya dalam laporan keuangan (Amran, Bin, dan Hassan 2009).

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang perbankan revisi tahun 2000, PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, dan Surat Edaran Ketua Bapepam (P3LKEPPBANK 2008) menyatakan bahwa bank wajib mengungkapkan informasi mengenai risiko umum yang dihadapi. Oleh karena itu, pengungkapan risiko di perbankan Indonesia merupakan pengungkapan wajib.

Fokus pemilihan perbankan sebagai objek penelitian karena bank merupakan lembaga yang

dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot 2009). Dalam menjalankan aktivitas operasinya, bank lebih banyak berhubungan dengan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya. Selain itu, perbankan dianggap memiliki tingkat regulasi yang tinggi (*highly regulated*), seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Di Indonesia, kasus bank bermasalah karena praktik perbankan yang tidak sehat yang mengesampingkan penerapan prinsip *corporate governance* telah banyak terjadi (<http://grundelbankcentury.wordpress.com> 2010). Kasus kredit macet yang menyebabkan likuidasi Bank Summa pada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelam industri perbankan di Indonesia. Kurangnya transparansi yang dilakukan pihak manajemen bank kepada *stakeholder*, merupakan salah satu penyebab utama maraknya kasus bank bermasalah yang terjadi di Indonesia. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan belum dilaksanakan dengan baik (<http://www.tempointeraktif.com> 2009).

Kasus skandal laporan keuangan ganda Bank Lippo menjadi salah satu contoh keengganan perbankan untuk mengungkapkan berapa besar laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan. Kasus Bank Lippo muncul setelah bank itu diketahui mengeluarkan tiga laporan keuangan per 30 September 2002 yang berbeda, yaitu yang diiklankan di surat kabar pada 28 Nopember 2002, yang disampaikan ke BEI pada 27 Desember 2002, dan yang disampaikan ke manajemen Bank Lippo 6 Januari 2003 (<http://suaramerdeka.com>, 2011). Beberapa kasus lain yaitu kasus L/C (*letter of credit*) fiktif Bank BNI tahun 2003, kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun 2004, kasus Bank Century tahun 2008, dan masih banyak kasus bank bermasalah lainnya yang membuktikan kurangnya penerapan prinsip *corporate governance* pada perbankan di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh Helbok dan Wagner (2006) pada perbankan di Nord-America, Asia dan Europe, Hossain (2008) pada perbankan di India,

Oorschot (2009) pada perbankan di Jerman, Ho dan Wong (2001), Abraham dan Cox (2007), Khomsiyah (2003), Lajili dan Zeghal (2005), Hassan (2009), dan Amran, Bin, dan Hassan (2009). Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum ada penelitian yang menguji peran *corporate governance* dalam *risk disclosure* pada perbankan Indonesia dengan menggunakan variabel seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Risk Disclosure

Pengungkapan risiko penting karena membantu *stakeholder* dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko. Pengungkapan risiko juga bermanfaat untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tersebut tidak terjadi (Linsley dan Shrivies 2006). Informasi risiko juga berguna bagi investor karena dapat membantu menentukan profil risiko perusahaan, mengurangi asimetri informasi, memperkirakan nilai pasar, dan menentukan keputusan investasi portofolio (Abraham dan Cox 2007 dan Hassan 2009).

Dalam Keputusan Bapepam LK Nomor: Kep-134/BL/2006, menyatakan bahwa manajemen wajib mengungkapkan uraian singkat mengenai tata kelola perusahaan yang meliputi:

“Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah”.

Menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan

limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Agar pengungkapan risiko dalam laporan tahunan mencukupi kebutuhan informasi para *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan adanya *corporate governance*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Solomon, Norton, dan Joseph (2000) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko merepresentasikan perbaikan praktik *corporate governance*.

Corporate Governance

Forum for Corporate Governace in Indonesia (2000: 1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Tujuan *corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD (2004), terdapat empat prinsip dasar dalam penerapan *corporate governance* yaitu: (1) kewajaran (*fairness*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) transparansi (*transparency*), (4) tanggung jawab (*responsibility*). Beberapa aspek penting dalam *corporate governance* adalah dewan komisaris dan komite audit.

Egon Zehnder dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang mengawal pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwa peran pengawasan sekaligus

akuntabilitas dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia pada umumnya belum memadai. PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, mewajibkan dewan komisaris membentuk sekurang-kurangnya komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris. Komite audit independen tidak terafiliasi dengan perusahaan dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI 2001), sehingga kinerjanya dalam membantu dewan komisaris dapat dipercaya.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tingkat Risk Disclosure

Menurut Dalton et al (1999) *board size* dengan ukuran yang optimum lebih efektif daripada *board size* dengan ukuran kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Berdasarkan penelitian Akra, Eddie, dan Ali (2010) *board size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Risk Disclosure

Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris (Permatasari 2009). Selain itu, komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Abeysekera, 2008; Permatasari, 2009; dan Ettredge et al, 2010). Abraham dan Cox (2007) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

pengungkapan risiko. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat dikembangkan adalah

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Proporsi Komisaris Wanita terhadap Tingkat Risk Disclosure

Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) menyatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi dan lebih teliti daripada pria. Carter (2003) menemukan bahwa jumlah komisaris wanita mempengaruhi nilai perusahaan. Bonna, Yoshikawab, dan Phan (2004) menemukan bukti bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk pengungkapan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

H₃: Proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama terhadap Tingkat Risk Disclosure

Latar belakang pendidikan komisaris utama mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi (Suhardjanto dan Afni, 2009). Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) menyatakan bahwa anggota dewan yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan bisnis. Suhardjanto dan Afni (2009) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* pada *annual report* perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah

H₄: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh dengan tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Latar Belakang Etnik Komisaris Utama terhadap Tingkat Risk Disclosure

Karakteristik personal komisaris utama yang berasal dari etnis yang memiliki sifat ulet, gigih, seperti Tionghoa menjadi faktor penentu dalam kinerja perusahaan (Suhardjanto dan Anggitarani, 2010). Branco dan Rodrigues (2008) menjelaskan

keterlibatan anggota komisaris asing meningkatkan kausalitas pelaporan. Fields dan Keys (2003) menemukan heterogenitas pengalaman, ide, dan inovasi individu dengan latar belakang budaya yang berbeda berdampak terhadap kinerja perusahaan. Erhardt, James, dan Charles (2003) berpendapat bahwa representasi etnis di jajaran dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja keuangan bisnis. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₅: Latar belakang etnik komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Risk Disclosure

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2003) dan Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

H₆: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Risk Disclosure

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitannya dengan praktik kinerja perusahaan (Cety dan Suhardjanto, 2010). Ettredge et al (2010) juga menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₇: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

Pengaruh Proporsi Komite Audit Independen terhadap Tingkat Risk Disclosure

Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan

dan memonitoring kinerja manajemen. Nasution dan Setiawan (2007), Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan *risk disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₈: Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat *risk disclosure*.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

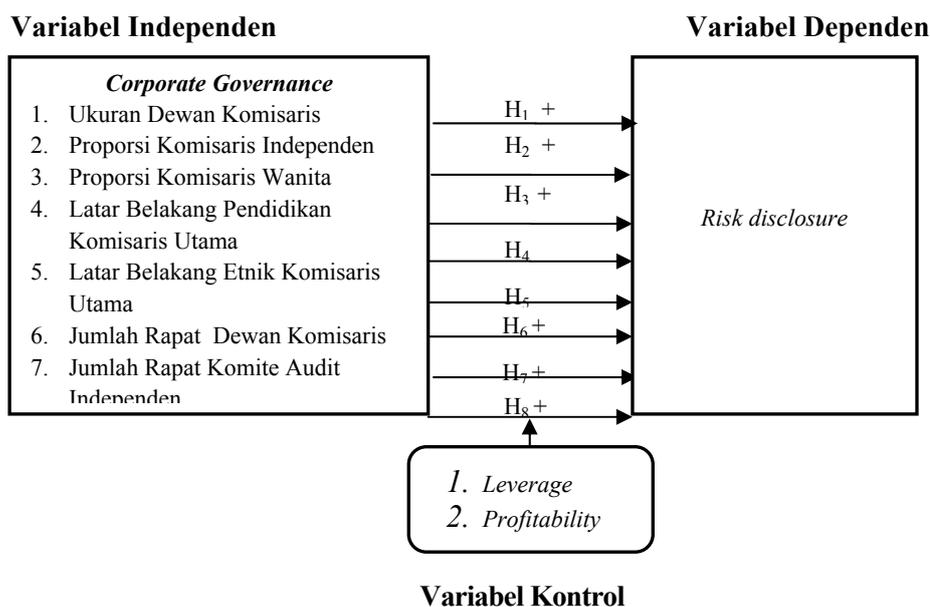
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan harus terdaftar selama tahun 2007 hingga 2009 dan tidak mengalami *delisting*. Berdasarkan kriteria tersebut, dari 84 populasi, diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 *annual report* perbankan yang memenuhi kriteria.

Data dan Metoda Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2009. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan sampel. Kerangka mengenai hubungan antar masing-masing variabel dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1 Skema Konsep Penelitian



Selain menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel Independen

a) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris direpresentasikan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan

komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan (independen) sesuai dengan penelitian Dalton et al (1999), Nasution dan Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008).

b) Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan

komisaris perusahaan Suhardjanto dan Afni (2009). Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian

Eng dan Mak (2005), dan Miranti (2009), yaitu:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

c). Proporsi Komisaris Wanita

Indikator yang digunakan adalah persentase komisaris wanita dari seluruh anggota dewan

komisaris perusahaan (Marinova, Plantenga, dan Remery, 2010) dan (Peterson dan Philpot, 2009) sehingga rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi Komisaris Wanita} = \frac{\sum \text{Komisaris Wanita}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

d) Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Mengacu pada penelitian Suhardjanto dan Miranti (2009) dan Haniffa dan Cooke (2005) komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau bisnis diberi kode 1, dan selain bisnis diberi kode 0.

Ukuran yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Vafeas (2003), Brick dan Chidambaran (2007), dan Cety dan Suhardjanto (2010).

e) Latar Belakang Etnik Komisaris Utama

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila dewan komisaris berasal dari kaum pribumi dikode 1, jika dewan komisaris berasal dari etnis Tionghoa maka dikode 2, dan jika berasal dari negara lainnya maka dikode 3 (Suhardjanto dan Anggitarani, 2010).

g) Jumlah Rapat Komite Audit

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li et al (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge et al (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

f) Jumlah Rapat Dewan Komisaris

h) Proporsi Komite Audit Independen

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010).

$$\text{Proporsi Komite Audit Independen} = \frac{\sum \text{Komite Audit Independen}}{\sum \text{Komite Audit}} \times 100 \%$$

Variabel Dependen

Mengacu pada penelitian Oorschot (2009), tingkat *risk disclosure* diukur dengan menggunakan teknik *scoring*. Skor 1 diberikan untuk item *risk* yang diungkapkan oleh perusahaan dan skor 0 bagi item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. *Risk disclosure* dalam penelitian ini diperoleh dari skor total pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dibagi jumlah item pengungkapan yang diwajibkan. Risiko yang wajib diungkapkan tersebut meliputi: (1) Risiko kredit, (2) Risiko pasar

yang dibagi menjadi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, (3) Risiko likuiditas, (4) Risiko operasional, (5) Risiko hukum, (6) Risiko reputasi, (7) Risiko strategi, dan (8) Risiko kepatuhan (PBI Nomor: 5/8/PBI/2003).

Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kuantitas *risk disclosure* dalam penelitian ini:

$$RDS_{BY} = \frac{1}{MAX_{BY}} \sum_{i=1}^n SCORE_{BY}$$

Keterangan Persamaan

Simbol	Keterangan
RDS_{BY}	Skor pengungkapan bank B pada tahun Y
MAX_{BY}	Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y
i	Item dalam <i>framework</i>
$SCORE_{iBY}$	Skor untuk item i , bank B pada tahun Y

Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini ada dua variabel kontrol yang digunakan yaitu *leverage* dan profitabilitas.

a) *Leverage*

Penelitian ini konsisten dengan pengukuran yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dan Suhardjanto dan Afni (2009) yaitu membandingkan total utang dengan total ekuitas, *leverage* dihitung menggunakan rumus:

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b) *Profitability*

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dan Suhardjanto dan Miranti (2009), *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas, yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Pendapatan Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Metoda Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 16. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$RDS = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 PRODKI + \beta_3 PROPKW + \beta_4 LBPKU + \beta_5 LBEKU + \beta_6 RPTDEKOM + \beta_7 RPTKA + \beta_8 PROKAI + \beta_9 LEV + \beta_{10} PROF + e$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
RDS	<i>Risk Disclosure Score</i>
BFSIZE	Ukuran Dewan Komisaris
PRODKI	Proporsi Komisaris Independen
PROPKW	Proporsi Komisaris Wanita
LBPKU	Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama
LBEKU	Latar Belakang Etnik Komisaris Utama
RPTDEKOM	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
RPTKA	Jumlah Rapat Komite Audit
PROKAI	Proporsi Komite Audit Independen
LEV	<i>Leverage</i>
PROF	Profitabilitas
β	Koefisien Regresi
e	<i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia

selama tahun 2007-2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Tahun	Populasi	Perolehan sampel sesuai kriteria	Sampel dapat digunakan
2007	29	25	20
2008	28	25	20
2009	29	25	20
Total	86	75	60

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 perbankan. Hal tersebut dikarenakan dari 84 populasi, sejumlah 75 perusahaan tidak mengalami *delisting* selama periode 2007-2009, tapi hanya 60 perusahaan yang menyediakan data dan informasi secara lengkap.

Tabel 2 di bawah ini menjelaskan statistik deskriptif dari variabel dependen penelitian. Informasi mengenai statistik deskriptif tersebut meliputi: nilai minimum, maksimum, rerata (*mean*) dan standar deviasi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Risk Disclosure

Variabel	Mean	Min	Max	St. Deviasi
RDS (%)	51,42	27,00	84,00	0,13

Tabel 2 menunjukkan rerata tingkat pengungkapan risiko pada perbankan di Indonesia berada pada *score* 51,42%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan risiko masih berada di tingkat rendah, mengingat pengungkapan risiko adalah salah satu pengungkapan wajib yang diharuskan oleh PSAK No. 50 (Revisi 2006). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Solomon et al (2000) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko merepresentasikan perbaikan praktik *corporate governance*. Bank Indonesia selaku regulator belum membuat regulasi yang memadai dan spesifik mengenai apa saja yang harus diungkapkan dalam *annual report* juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat *risk disclosure* pada perbankan di Indonesia.

Rendahnya tingkat *risk disclosure*, menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang merugikan *stakeholder*, terutama investor, nasabah dan pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu

penyebab maraknya kasus kejahatan bank yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus perbankan di Indonesia adalah kasus Bank Suma tahun 1992 mengenai laporan palsu karena tidak melaporkan kerugian dan pemberian kredit pada grupnya (www.tempointeraktif.com, 1992). Kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengungkapan informasi agar *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga kemungkinan kerugian yang diterjadi semakin kecil.

Statistik deskriptif dari variabel independen penelitian dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini. Rerata jumlah anggota dewan komisaris adalah 5 orang; rerata proporsi komisaris independen sebesar 59,72%; rerata proporsi komisaris wanita 10,20%, rerata frekuensi rapat dewan komisaris 15,78 rerata rapat komite audit 13,55, proporsi komite audit independen 89,54%, rerata *leverage* 9,29, dan rerata profitabilitas 11,07.

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel	Mean	Min	Max	St. Deviasi
BSIZE	5,08	1,00	8,00	1,94
PRODKI (%)	59,72	38,00	100,00	0,11
PROPKW(%)	10,20	0,00	67,00	0,17
RPTDEKOM (kali/tahun)	15,78	3,00	51,00	13,79
RPTKA (kali/tahun)	13,55	1,00	50,00	10,87
PROPKAI (%)	89,54	50,00	100,00	16,04
LEV (%)	9,29	3,75	16,53	2,96
PROF (ROE)	11,07	-0,78	26,81	7,11

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *backward*. Metode *backward* adalah metode yang dimulai dengan semua variabel membentuk fungsi diskriminan, selanjutnya setiap langkah satu variabel dikeluarkan dari fungsi determinan, yaitu variabel yang memiliki jumlah penurunan terkecil dalam *discriminating power* dan prosedur ini terus diulang sampai tidak ada variabel yang dikeluarkan dari fungsi diskriminan (Ghozali, 2006). Hasil regresi berganda setelah pengujian asumsi klasik dapat dilihat sebagai berikut.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 38,30% dan *Adjusted R Square*

(*Adjusted R²*) sebesar 35,00%. Berdasarkan nilai *Adjusted R²* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 35,00% *risk disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variable kontrol dan sisanya sebanyak 65,00% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel tersebut menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,586 dengan probabilitas 0,000 (*p-value* < 0,050). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas lebih kecil dari 0,050, maka model regresi ini menunjukkan model yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *risk disclosure* dan dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dan kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap *risk disclosure* (Ghozali, 2006).

Tabel 4 Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	0,241	3,929	0,000
BSIZE	0,024	3,342	0,001*
PRODKI	0,019	0,140	0,889
PROPKW	0,059	0,541	0,591
LBP KU	-0,135	-1,288	0,203
LB EKU	-0,009	-0,082	0,935
RPTDEKOM	0,004	3,684	0,001*
RPTKA	-0,006	-0,040	0,968
PROPKAI	0,041	0,350	0,728
LEV	0,010	1,979	0,053**
PROF	0,116	0,959	0,342
<i>R-Square</i>	0,383		
<i>Adjusted R-Square</i>	0,350		
F	11,586		
Sig	0,000		

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

**Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris pada tingkat signifikansi 0,005 serta *leverage* pada tingkat signifikansi 0,010 sedangkan untuk variabel proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnik komisaris utama, rapat komite audit, proporsi komite audit independen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Ukuran dewan komisaris ($\beta= 0,024$ dan $p\text{-value}= 0,001$) menunjukkan bahwa *board size* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *risk disclosure*. Koefisien positif yang dimiliki *board size* menunjukkan pengaruh positif *board size* terhadap tingkat *risk disclosure*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris, maka tingkat pengawasan dan tekanan terhadap manajemen semakin baik sehingga mendorong manajemen lebih transparan dalam mengungkapkan risiko.

Dalton et al (1999) menyatakan bahwa peranan keahlian atau konseling yang diberikan oleh dewan komisaris merupakan jasa yang berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh pasar. Jumlah komisaris yang besar menciptakan perpaduan keahlian dan pengalaman anggotanya sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen.

Hasil penelitian Coller dan Gregory (1999) menunjukkan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka pengendalian terhadap *Chief Executif Officer* (CEO) dan *monitoring* yang dilakukan semakin efektif. Semakin besar ukuran dewan komisaris, kemampuannya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* semakin baik. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan, maka dewan komisaris dengan ukuran yang besar memiliki *power* yang lebih besar untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi lebih banyak mengenai perusahaan, termasuk *risk disclosure*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil

penelitian Sembiring (2005), Abeysekera (2008), dan Akra, Eddie, dan Ali (2010).

Proporsi dewan komisaris independen ($\beta= 0,019$ dan $p\text{-value}= 0,889$) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris belum memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan *corporate governance* dan kebijakan strategis bank sehingga peran komisaris independen pada perbankan di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya. Koefisien positif menunjukkan pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan risiko.

Survei dari Asian Development Bank (2004) menemukan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan tidak efektif karena timbulnya masalah dalam koordinasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan. Dengan timbulnya masalah tersebut dapat menyebabkan lemahnya kemampuan untuk mengawasi manajemen. Berdasarkan hal tersebut, tingginya proporsi komisaris independen tidak menjamin perbankan meningkatkan pengungkapan risiko. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2003) dan Ho dan Wong (2001).

Proporsi komisaris wanita ($\beta= 0,059$ dan $p\text{-value}= 0,591$) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak mempengaruhi pengungkapan risiko. Koefisien positif menunjukkan pengaruh positif proporsi komisaris wanita terhadap pengungkapan risiko. Hal ini disebabkan adanya ruang gerak yang terbatas, sehingga perempuan yang aktif pada peran publik (berkarier di luar rumah tangga) mempunyai peran ganda dan peran tersebut diduga dapat mempengaruhi kinerja (Zulaikha, 2006). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nalikka (2009), yaitu proporsi komisaris wanita tidak mempengaruhi pengungkapan informasi di *annual report*.

Latar belakang pendidikan komisaris utama ($\beta = -0,135$ dan $p\text{-value} = 0,203$) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak mempengaruhi pengungkapan risiko. Hal tersebut mengindikasikan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak menentukan keputusan perbankan dalam mengungkapkan informasi mengenai risiko. Selain itu, kemampuan atau keahlian seseorang tidak hanya berdasarkan latar belakang pendidikan, tapi juga pengalaman. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) dan Suhardjanto dan Miranti (2009).

Latar belakang etnik komisaris utama ($\beta = -0,009$ dan $p\text{-value} = 0,936$) menunjukkan bahwa latar belakang etnik komisaris utama tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Hal ini mungkin disebabkan latar belakang etnis komisaris utama pada perbankan di Indonesia khususnya perbankan yang memiliki kapasitas bisnis yang besar didominasi oleh komisaris utama yang berasal dari kalangan pribumi/Indonesia. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) dan Erhardt et al (2003).

Jumlah rapat dewan komisaris ($\beta = 0,004$ dan $p\text{-value} = 0,001$) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Koefisien positif menunjukkan adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, banyaknya rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris memberikan lebih banyak waktu untuk membahas pelaksanaan *corporate governance* termasuk *risk disclosure*. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank sesuai pasal 9, PBI Nomor: 8/14/PBI/2006. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkatkan *risk disclosure* (<http://komiteaudit.org>, 2011).

Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge et al (2010), ketika semakin banyak rapat dewan komisaris yang diselenggarakan maka

semakin mendorong kepatuhan terhadap *risk disclosure*.

Jumlah rapat komite audit ($\beta = -0,006$ dan $p\text{-value} = 0,968$) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Koefisien jumlah rapat komite audit negatif mengindikasikan setiap ada perubahan jumlah rapat komite audit akan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko dengan arah yang berkebalikan. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan belum dilaksanakan dengan baik sesuai pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006.

Proporsi komite audit independen ($\beta = 0,041$ dan $p\text{-value} = 0,728$) menunjukkan bahwa proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Hal tersebut dikarenakan pemilihan anggota komite audit independen masih belum jelas dan terbuka, sehingga independensinya masih diragukan (Mintara, 2008). Pemilihan komite audit di Indonesia mungkin kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi seperti pemilihan komisaris independen. Faktor tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemahaman komite audit independen terhadap tugasnya dalam mengawasi manajemen.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel kontrol, yaitu *leverage* dan profitabilitas. Variabel kontrol yang pertama adalah *leverage* ($\beta = 0,010$ dan $p\text{-value} = 0,053$) mencerminkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko. Perusahaan dengan tingkat ketergantungan terhadap utang yang tinggi cenderung mengungkapkan risiko dengan lebih baik dan informatif. Hal ini terjadi mengingat aktivitas yang berhubungan dengan utang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi sehingga perlu adanya manajemen risiko dan pengungkapan yang baik dalam rangka memitigasi risiko yang terjadi.

Variabel kontrol yang kedua adalah profitabilitas ($\beta = 0,116$ dan $p\text{-value} = 0,342$)

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Koefisien positif berarti profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas yang mencukupi menjadikan perusahaan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang menyatakan besar kecilnya profitabilitas tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan *corporate governance* mempengaruhi tingkat *risk disclosure*. Variabel yang mempengaruhi tingkat *risk disclosure* berupa ukuran dewan komisaris (*board size*), jumlah rapat dewan komisaris dan *leverage*. Variabel lainnya yaitu proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris utama, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*.
- 2) Rerata tingkat *risk disclosure (RDS)* adalah sebesar 51,42%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko pada *annual report* perbankan di Indonesia masih rendah mengingat pengungkapan risiko adalah salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) seperti disebutkan dalam PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (2006) dan P3LKEPPBANK (2008). Rendahnya tingkat pengungkapan risiko karena belum adanya kejelasan mengenai item pengungkapan, sehingga perbankan sendiri masih seperti

kebingungan mengenai apa saja yang harus diungkapkan dalam *annual report*.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

- 1) Diharapkan adanya peningkatan peran dewan komisaris sehingga dapat meningkatkan *risk disclosure* pada perbankan Indonesia. Sebagai komponen penting yang mendukung terlaksananya *corporate governance*, dewan komisaris harus lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Bank Indonesia perlu membuat regulasi yang jelas mengenai item risiko wajib karena *risk disclosure* merupakan salah satu pengungkapan wajib yang harus dilakukan oleh bank.
- 3) Perlu diadakan sosialisasi mengenai penerapan PSAK No. 50 (revisi 2006) yang sudah diperbarui menjadi menjadi PSAK No. 60 (revisi 2010) agar di tahun 2012 dapat efektif diterapkan oleh bank. PSAK No.60 (revisi 2010) dapat dijadikan acuan utama dalam penerapan dan pengungkapan *risk* oleh perbankan berdampingan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. 2008. *The Role of Corporate Governance in Intellectual Capital Disclosure of Kenyan Listed Firms*. <http://ssrn.com>. 30 Agustus 2010.
- Abraham, S., dan P. Cox. (2007), Analyzing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *British Accounting Review* 39: 227-248.
- Akra, M.A., I.A. Eddie, dan M.J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 42: 170-186.
- Amran, A., A.M.R. Bin, dan B.C.H.M. Hassan. 2009. An exploratory study on risk disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal* 24(1): 39-57.

- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. <http://eprints.undip.ac.id>. 15 September 2010.
- Arifin, S. 2002. *An Empyrcal Analysis of The Relation Between The Board of Director's Composition an the level of Voluntary Disclosure*. Simposium Nasional Akuntansi V.
- Bonna, I., T. Yoshikawabdan, dan P.H. Phan. 2004. Effects of Board Structure on Firm Performance: A Comparison between Japan and Australia. *Journal of Asian Business & Management* 3: 105-125.
- Brick E I., dan Chidambaran N.K. 2007. *Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance*. <http://ssrn.com>. 21 November 2010.
- Cety T. dan D. Suhardjanto. 2010. *Pengaruh Corporate Terhadap Environmental Performance di Indonesia*. Call for Paper Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3 November 2010.
- Che H., M. Hassan, R.A. Rahman, dan S. Mahenthiran. 2008. Corporate Governance, Transparency, and Performance of Malaysian Companies. *Journal of Managerial Auditing* 23(8): 744-778.
- Coller, P., dan A. Gregory, 1999. Audit committee activity and agency cost. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18(4-5): 311-332.
- Dalton, D.R., C.M. Daily, J.I. Johnson, dan A.E. Ellstrand. 1999. Number of directors and financial performance: A meta-analysis. *Academy of Management Journal* 42(6): 974-686.
- Devilin, A.P. 2009. Analisis Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan. Universitas Diponegoro. Skripsi Tidak Dipublikasi.
- Eng, L.L., dan Y.T. Mak. 2003. Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal Accounting and Public Policy* 22: 325-345.
- Erhardt, N.L., D.W. James, dan B.S. Charles. 2003. Board of director diversity and firm financial performance. *Corporate Governance – An International Comparison* 11(2): 102-11.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2000. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. <http://fcgi.or.id>. 15 September 2010.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics. Forth Edition*. New York: Mc. Graw-Hill.
- Hassan, M.K. 2009. UAE corpoations-specific characteristic and level of risk disclosure. *Managerial Auditing Journal* 24(7): 668-687.
- Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. 2005. The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391–430.
- Helbok, G., dan C. Wagner. 2006. *Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry*. <http://ssrn.com>. 27 Agustus 2010.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. <http://muharieffendi.files.wordpress.com>. 1 November 2010.
- Ho, S.S.M., dan K.S. Wong. 2001. A Study of relationship between corporate governance structure and extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation* 10: 139-156.
- Hossain, M. 2008. The extent of disclosure in annual reports of banking companies: The

- case of India. *European Journal of Scientific Research* 23(4): 659-680.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- John, K., dan L. Senbet. 1998. Corporate governance and board effectiveness. *Journal of Banking and Finance* 22(4): 371-403.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. <http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.I.5.pdf>. 9 November 2010.
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Khan, Md.H. 2010. The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management* 52 (2): 82-109.
- Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. <http://bapepam.go.id>. 15 September 2010.
- Kusumastuti, S. Supatmi, dan S. Perdana. 2007. Pengaruh *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif *Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9 (2): 88-98.
- Lajili, K., dan D. Zeghal. 2005. A content analysis of risk disclosure in Canadian annual report. *Canadian Journal of Administrative Science* 22(2): 125-142.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003 Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. <http://bi.go.id>. 5 Oktober 2010.
- Li, Jing, R. Pike, dan R. Haniffa. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159.
- Linsmeir, T. J., dan N. D. Pearson. 1997. Quantitative disclosures of market risk in the SEC release. *Accounting Horizons* 11(1):107-135.
- Meek, G.K., C.B. Roberts, S.J Gray. 1995. Factors influencing voluntary annual report disclosure by U.S, U. K and Continental European multinational corporation. *Journal of International Business Studies (Third Quarter)* 26: 555-572
- Nasution dan Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. <http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf>. 3 November 2010.
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. <http://iaiglobal.org>. 5 November 2010.
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan. <http://iaiglobal.org>. 5 November 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. <http://bi.go.id>. 5 September 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan

- Manajemen Risiko bagi Bank Umum. <http://bi.go.id>. 5 September 2010.
- Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2000 Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa
- Permatasari, N.D.. 2009. Pengaruh *corporate governance*, latar belakang pendidikan, terhadap *environmental disclosure*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasi.
- Sembiring, E.R. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Solomon, J.F., A. Solomon, D.N. Simon dan L.J. Nathan 2000. A Conceptual Framework for Corporate Risk Disclosure Emerging from the Agenda from Corporate Governance Reform. *British Accounting Review* 32: 447-478.
- Suhardjanto, D., dan A. Anggitarani. 2010. Karakteristik dewan komisaris dan komite audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi* 14(2): 125-139.
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. 2009. Praktik *corporate social disclosure* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 8(3): 265-279
- Suhardjanto, D., dan L. Miranti. 2009. Praktik penerapan Indonesian *environmental reporting index* dan kaitannya dengan karakteristik perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 13(1): 63-77.
- Surat Edaran Ketua Bapepam dengan Nomor: SE-02/BL/2008 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan. 2008. www.bapepam.go.id/pasar.../publikasi_pm/.../P3LKEPPBANK.pdf. 8 November 2010.
- Van Oorschot, L. 2009. *Risk Reporting: An Analysis of German Banking Industry*. <http://oathesis.eur.nl>. 30 Agustus 2010.
- Vafeas, N. 2003. Further Evidence on Compensation Committee Composition As A Determinant of CEO Compensation. *Financial Management* 32: 53-77.
- Wahyudi. J. 2010. *Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance, Ukuran Dewan Komisaris, dan Tingkat Cross-Directorship Dewan Terhadap Nilai Perusahaan*. <http://eprints.undip.ac.id>. 30 Agustus 2010.
- Wan Mohamad, W.I.A., dan Z. Sulong. 2010. Corporate governance mechanisms and extent of disclosure: evidence from listed companies in Malaysia. *International Business Research* 3(4): 216-228.
- www.bataviase.co.id. 2010. 3 Februari 2011
- www.denpasar.tv. 2004. Februari 2011.
- www.idx.co.id
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/18/nas4.htm>. 13 Februari 2011.
- http://komiteaudit.org/informasi_displayartikel.asp?idi=119. 10 Februari 2011.